

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi sebagai sarana untuk mendorong pembangunan daerah. Hadirnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi sehingga menghasilkan peluang kerja bagi masyarakat. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang memiliki peran cukup besar dalam peningkatan daya serap tenaga kerja (Lubis et al., 2022).

UMKM merupakan unit usaha atau organisasi yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga. UMKM memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar (Wahyudiati & Isroah, 2018). Kementerian Koperasi dan UKM RI menyatakan, pada tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai angka 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7 % atau senilai Rp. 8.573,89 Triliun. UMKM juga tercatat menyerap dan memberikan lapangan kerja sebesar 97 % dari jumlah tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja. UMKM memiliki daya tahan yang dapat menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi, terutama di saat kelesuan ekonomi global yang berdampak pada pelaku ekonomi menengah atas. Salah satu tugas UMKM adalah untuk meratakan taraf ekonomi rakyat. UMKM mampu membantu meningkatkan

perolehan devisa Negara karena pasarnya dapat mencapai tingkat nasional dan internasional. Selain itu, UMKM juga merupakan sarana untuk mengentaskan kemiskinan sosial (Wahyudiati & Isroah, 2018).

Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat dominan. Menurut Kristiyanti (2012) ketangguhan UMKM sebagai salah satu pilar yang dapat menopang perekonomian bangsa telah terbukti mampu bertahan hidup dan bersaing di tengah krisis ekonomi. Semakin banyak UMKM yang berhasil dan berkembang maka semakin banyak produk yang akan dihasilkan dan semakin luas juga pasarnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Namun dibalik peranan yang sangat penting dalam menyokong perekonomian Negara, UMKM menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, para pelaku UMKM dihadapkan dengan tantangan yang global dan pasar bebas dimana arus barang, jasa dan informasi mengalir dengan cepat sehingga persaingan usaha menjadi hal yang tak terhindarkan. Dari sisi internal, kurangnya modal, ketidak

mampuan menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi merupakan salah satu kelemahan dari sisi manajemen UMKM. Dalam hal ini informasi akuntansi memiliki peran yang penting bagi pencapaian keberhasilan sebuah usaha (Firdarini,2019).

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan sektor UMKM. Hal ini dapat dilihat dari beragam produk yang telah dihasilkan oleh UMKM Provinsi Sumatera Selatan ini. Seperti kain tenun, kain songket, batik, dan makanan khas daerah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang dan telah menjadi bagian penting dari perekonomian daerah. Sejalan dengan perkembangan zaman, UMKM di Sumatera Selatan terus tumbuh dan berkembang serta semakin dikenal oleh masyarakat. Secara umum kondisi UMKM di Provinsi Sumatera Selatan dalam satu tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dilansir dari Databoks (2023) Kementerian Koperasi dan UKM, Pada tahun 2022 jumlah UMKM di Sumatera Selatan sebanyak 330.693 unit dan meningkat menjadi 860.000 unit pada tahun 2023.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa Kabupaten dan Kota-Kota besar salah satunya yaitu Kota Palembang. Palembang sendiri merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang memiliki banyak potensi ekonomi, termasuk sektor UMKM yang menjadi sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Wilayah ini mempunyai beragam potensi sumber daya alam seperti hasil perikanan, pertanian, dan tambang yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi UMKM. Dari data yang disebutkan oleh Dinas

Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah pelaku UMKM Kota Palembang mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM Kota Palembang yang terdata berjumlah 37.101, pada tahun 2019 meningkat menjadi 37.902, pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 40.130, dan ditahun 2021 para pelaku UMKM Kota Palembang meningkat menjadi 60.879, dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang pesat menjadi 80.903 jumlah pelaku UMKM yang berada di Kota Palembang. Berikut tabel jumlah pelaku UMKM di Kota Palembang dalam 5 (lima) tahun terakhir.

**Tabel 1. 1 Jumlah Pelaku UMKM di Kota Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
2018	37.101
2019	37.902
2020	40.130
2021	60.879
2022	80.903

*Sumber: Diskopukm.palembang.go.id*

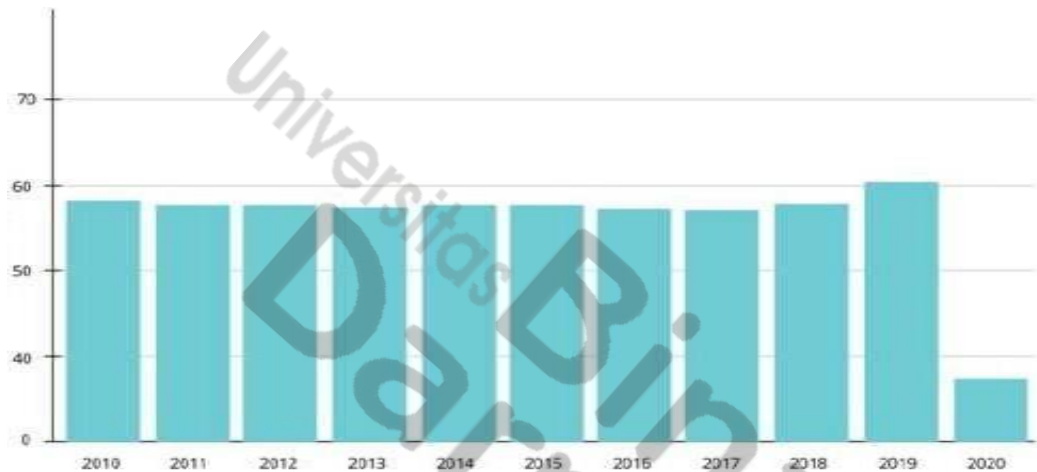
Secara umum, meskipun kontribusi UMKM terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja mengalami peningkatan, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kemajuan kinerjanya. Salah satu hambatan yang signifikan bagi perkembangan UMKM, terutama di Kota Palembang, adalah teknologi digitalisasi. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses sumber pendanaan yang memadai. Akibatnya, keterbatasan modal sering kali menjadi penghalang bagi mereka dalam mengembangkan usaha dan

memperluas jaringan bisnis. Hal ini menyebabkan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak mengalami peningkatan yang signifikan (Lubis et al., 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses pembiayaan yang terbatas. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai program dan kebijakan untuk mendukung pembiayaan UMKM, banyak pelaku UMKM masih kesulitan mendapatkan dana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya agunan yang dimiliki oleh UMKM, rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha, serta prosedur perbankan yang masih dianggap rumit dan memakan waktu. (pupung purnamasari, 2024). Bukan menjadi rahasia lagi jika sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian negara. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian negara karena telah memberikan kontribusi PDB atau Produk Domestik Bruto dan juga menambah lapangan kerja untuk masyarakat.

Hal ini terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Saat ini terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia yang mana telah mempekerjakan 114,7 juta orang atau sekitar 56% dari tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB negara. (*MSME Empowerment Report, 2022:5*).

**Gambar 1. 1 Diagram Kontribusi UMKM**



Sumber : *MSME Empowerment Report*

Agar bertahan di tengah persaingan yang ketat, terutama semenjak pandemi, berdasarkan data *MSME Empowerment Report* (2022:38), terdapat 83,8% pelaku UMKM yang melakukan digitalisasi atau memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional bisnis mereka. Menurut jurnal dari Plakoyiannaki et al. dalam Indriastuti dan Kartika, digitalisasi menjadi peluang bagi UMKM untuk beralih dari perdagangan tradisional ke tren baru yang menerapkan teknologi.

Digitalisasi menyebabkan banyak UMKM mulai mempromosikan produk dan layanan mereka melalui platform digital, baik dalam bentuk gambar dan video. Lalu, mereka juga membuat toko online di *marketplace* untuk memudahkan pelanggan menemukan produk mereka. Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Berry Fauzi, mengatakan, UMKM banyak memanfaatkan jaringan *marketplace* untuk memasarkan produknya di masa pandemi (*MSME Empowerment Report*, 2022, halaman 12). “Sebanyak 40%

UMKM menggunakan *social media*, 38% menggunakan *instant messaging*, menggunakan *e-commerce* 13%, dan *ride hailing* 5%,” ucap Berry. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian UMKM yang sudah beradaptasi dengan digitalisasi. Sebab, pemilik UMKM masih menemui beberapa kendala dalam mengembangkan usahanya menuju ke era digital.

Ketika bertransformasi ke digitalisasi, tentunya UMKM akan menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh DSInnovate ke 1.500 pemilik UMKM, ditemukan beberapa kendala yang dialami oleh UMKM.

**Tabel 1.2 Survei Kendala Yang Dialami UMKM**

No	Tantangan	Persentase
1	Product marketing	70.2%
2	Access to capital	51.2%
3	Fulfillment/availability of raw materials	46.3%
4	Digital/Tech Adoption	30.9%
5	Transaction process	30.8%
6	Cash flow management	24.3%
7	Other	1.7%

*Sumber: MSME Empowerment Report 2022*

Umumnya, 70,2% pemilik UMKM bermasalah saat melakukan pemasaran produk. Permasalahan berikutnya ialah berkaitan dengan akses permodalan (51,2%), pemenuhan atau persediaan bahan baku (46,3%), dan adopsi digital (30,9%). Tantangan pertama berkaitan dengan pemasaran produk. UMKM harus membangun *brand image* yang kuat agar dapat bersaing dengan yang lain, dan sumber daya keuangan mereka pun terbatas sehingga sulit bagi mereka untuk

mengalokasikan dana untuk kegiatan pemasaran, Kedua ialah tantangan keuangan. Menurut survei Bank Indonesia terbaru pada MSME Empowerment Report 2022, halaman 23), 69,5% UMKM belum menerima pinjaman. Tantangan ini bersumber dari rendahnya literasi keuangan peminjam atau UMKM. Pada saat yang sama, peminjam (bank dan *multifinance*) juga menghadapi beberapa tantangan untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Selain itu, transaksi manual seringkali tidak memiliki pencatatan yang intensif, membuat laporan keuangan tidak lengkap. Padahal laporan pembukuan yang tertata membantu pengusaha untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih komprehensif lagi, misalnya untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tantangan berikutnya berkaitan dengan adopsi digital. Terdapat empat tantangan bagi UMKM dalam adopsi digital. Pertama, kurangnya infrastruktur digital yang andal. Melansir dari Databoks Katadata,

Indonesia mendominasi jumlah penduduk di Asia Tenggara sebesar 40,9%. Meskipun memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, banyak wilayah terpencil atau pedesaan di Indonesia belum memiliki akses konektivitas internet. Hal ini akan mempersulit UMKM di area ini untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti *e-commerce* dan pemasaran online. Selain sulit mendapatkan koneksi internet, mereka juga tidak memiliki perangkat keras yang andal untuk menggunakan teknologi digital, seperti HP dan laptop. Tantangan lainnya adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan digital di kalangan pemilik UMKM dan karyawan, terutama di daerah pedesaan. Hal ini mempersulit mereka dalam memanfaatkan teknologi dengan efisien. Tantangan berikutnya ialah akses sumber keuangan dengan meminjam dana usaha pada bank agar pemilik UMKM dapat berinvestasi

dalam teknologi dan infrastruktur digital. *International Finance Corporation* melaporkan bahwa kurangnya akses ke keuangan merupakan hambatan utama bagi digitalisasi UMKM di negara berkembang. Data tersebut menunjukkan sekitar 60% UMKM di negara berkembang kekurangan kredit formal, sehingga sulit bagi mereka untuk berinvestasi dalam teknologi digital. (*Randi Eka, 2022*)

Tantangan adopsi digital terakhir adalah keamanan. Setiap UMKM perlu memiliki keahlian atau anggaran untuk mengimplementasikan protokol keamanan yang dapat melindungi aset digital mereka. Sebab, ditemukan bahwa 44 % serangan dunia maya terjadi pada usaha kecil (*Randi Eka, 2022*).

Digitalisasi telah menjadi aspek penting dalam perkembangan dunia usaha, termasuk UMKM. Di Kota Palembang, fenomena ini mulai terlihat dengan semakin banyaknya pelaku usaha kecil yang mencoba mengadopsi teknologi seperti media sosial, marketplace, dan layanan pembayaran digital (*Putri, Lestari, & Kusuma, 2023*). Tujuannya tentu untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan memperluas jangkauan pasar. Pandemi COVID-19 menjadi katalis utama percepatan ini, ketika banyak UMKM terpaksa beralih ke saluran online untuk mempertahankan omzet (*Asrol, Lidyah, & Hartini, 2022*). Namun, meskipun peluangnya besar, adopsi teknologi digital belum merata di kalangan UMKM Palembang. Banyak pelaku usaha yang masih kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi digital, membuat konten promosi, hingga mengelola toko online secara efektif (*Putri et al., 2023*). Literasi digital yang rendah dan keterbatasan waktu untuk belajar teknologi menjadi faktor penghambat utama. Tak jarang, UMKM menyerahkan urusan digitalisasi kepada anggota keluarga yang lebih muda atau

memilih untuk tetap menggunakan cara konvensional. UMKM yang berhasil memanfaatkan digitalisasi secara optimal justru menunjukkan performa yang jauh lebih baik dalam hal penjualan dan efisiensi (Welly & Amir, 2025). Sebagai contoh, pelaku usaha kuliner yang aktif menggunakan platform pemesanan online dan media sosial mengalami kenaikan penjualan karena jangkauan pasar tidak lagi terbatas pada area sekitar. Teknologi juga memungkinkan otomatisasi dan analisis data sederhana yang bisa meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan strategis bagi keberlanjutan dan pertumbuhan laba UMKM di era modern (Asrol et al., 2022).

Perkembangan teknologi digitalisasi di kalangan pelaku UMKM Kota Palembang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Salah satu bukti konkret adalah peningkatan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai metode pembayaran digital. Penerapan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga membantu pelaku UMKM dalam memperluas jaringan pemasaran melalui platform digital (Theo, Haryanto, Setiawan, & Putra, 2025). Hal ini sangat penting karena selama pandemi COVID-19, digitalisasi menjadi salah satu kunci bertahan dan berkembangnya usaha mikro dan kecil, terutama di tengah keterbatasan interaksi fisik dan kebutuhan akses pasar yang lebih luas (Asrol et al., 2022). Dengan meningkatnya literasi digital dan akses teknologi, UMKM di Palembang mampu mengoptimalkan pemasaran online, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat pengambilan keputusan bisnis.

Modal usaha merupakan tulang punggung operasional bagi setiap pelaku UMKM. Di Kota Palembang, banyak UMKM yang memulai bisnis dengan modal terbatas, sering kali berasal dari tabungan pribadi atau pinjaman keluarga. Keterbatasan ini berdampak pada skala produksi, kemampuan inovasi, hingga pengadaan alat kerja (Yuniarti, 2024). Modal usaha menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan dan pengembangan UMKM di Kota Palembang. Ketersediaan modal ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memperbesar skala produksi, membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar, dan berinovasi pada produk mereka (Fathori, 2024). Kondisi modal yang memadai juga mendorong pelaku usaha untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal yang biasanya memiliki risiko bunga tinggi dan prosedur tidak transparan.

Dampak keterbatasan modal terlihat jelas ketika UMKM ingin mengembangkan usahanya. Banyak yang terhambat dalam melakukan ekspansi, membuka cabang baru, atau memperbarui alat produksi karena dana tidak mencukupi. Kondisi ini membuat UMKM lebih rentan terhadap fluktuasi pasar atau kenaikan biaya bahan baku. Akibatnya, profitabilitas sulit untuk ditingkatkan secara signifikan, meskipun permintaan pasar ada. UMKM cenderung bertahan, bukan berkembang.

Sebaliknya, UMKM yang memiliki akses ke modal yang cukup mampu beradaptasi lebih cepat dan menangkap peluang pasar yang ada. Modal yang memadai memungkinkan diversifikasi produk, peningkatan kapasitas produksi, serta pengelolaan stok yang lebih efisien (Yuniarti, 2024; Fathori, 2024). UMKM yang mampu berinvestasi dalam pengembangan bisnis, baik dari sisi produksi

maupun pemasaran, umumnya menunjukkan tren peningkatan laba dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, modal usaha menjadi variabel penting yang sangat memengaruhi pertumbuhan laba UMKM.

Akses pembiayaan formal menjadi tantangan signifikan bagi pelaku UMKM di Palembang. Banyak dari mereka tidak memiliki catatan keuangan yang rapi, surat izin usaha, atau agunan yang cukup untuk memenuhi persyaratan lembaga keuangan seperti bank (Yuniarti, 2024). Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh pinjaman modal kerja secara resmi dan harus bergantung pada pinjaman pribadi yang sering kali tidak stabil dan berisiko. Hal ini menjadi penghambat utama dalam mengembangkan usaha secara profesional dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah menghadirkan berbagai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tidak semua UMKM bisa mengaksesnya dengan mudah. Prosedur administratif yang rumit, ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap syarat dan mekanisme pengajuan, serta minimnya pendampingan menjadi kendala nyata (Pramesti & Susilo, 2024). Selain itu, beberapa pelaku UMKM merasa takut terhadap risiko bunga dan kewajiban cicilan, sehingga memilih untuk tidak mengambil pembiayaan sama sekali meskipun sangat membutuhkan tambahan modal.

Akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi salah satu tantangan utama bagi pelaku UMKM di Kota Palembang, namun terdapat indikasi perkembangan yang positif. Penyaluran kredit untuk sektor UMKM di Indonesia terus menunjukkan tren meningkat dengan kualitas kredit yang lebih baik (Pramesti & Susilo, 2024). Pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan kepercayaan

lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, sekaligus menandakan bahwa akses pembiayaan formal semakin membaik. Kemudahan akses pembiayaan ini sangat penting untuk membantu UMKM melakukan ekspansi usaha, investasi dalam teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi. Namun, hambatan seperti prosedur administrasi yang rumit dan rendahnya literasi keuangan masih menjadi kendala yang harus diatasi agar seluruh UMKM, terutama yang berada di segmen mikro dan kecil, dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara optimal.

UMKM yang berhasil mendapatkan akses pembiayaan formal, terutama yang berbunga rendah seperti KUR, menunjukkan kemajuan yang nyata. Mereka bisa mengalokasikan dana tersebut untuk investasi produktif, seperti pembelian alat baru, renovasi tempat usaha, atau perluasan lini produksi (Fathori, 2024). Dampaknya, kapasitas produksi meningkat dan laba pun mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, akses pembiayaan bukan hanya soal mendapatkan uang, tetapi juga soal mengembangkan bisnis secara profesional dan terstruktur.

Laba adalah indikator utama keberhasilan suatu usaha, termasuk UMKM. Di Kota Palembang, banyak pelaku UMKM yang berjuang keras untuk meningkatkan laba di tengah persaingan pasar yang ketat dan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Namun, peningkatan laba tidak bisa terjadi hanya karena naiknya harga jual produk. Dibutuhkan efisiensi dalam operasional, inovasi produk, serta strategi pemasaran yang tepat agar usaha bisa menghasilkan keuntungan yang optimal dan berkelanjutan (Welly & Amir, 2025). Peningkatan laba sangat bergantung pada bagaimana UMKM mengelola tiga aspek utama: teknologi, modal, dan pembiayaan.

UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi digital dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan mengurangi biaya promosi (Putri, Lestari, & Kusuma, 2023). Demikian pula, UMKM yang memiliki modal cukup bisa membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga menurunkan biaya satuan produksi (Yuniarti, 2024). Sementara itu, pembiayaan yang tepat memungkinkan ekspansi usaha secara sistematis (Fathori, 2024). Ketiganya secara sinergis berperan dalam meningkatkan margin keuntungan UMKM. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa UMKM yang menyeimbangkan ketiga aspek tersebut cenderung mengalami pertumbuhan laba yang lebih stabil dibandingkan UMKM tradisional. Sebagai contoh, usaha makanan ringan yang mengakses pembiayaan untuk membeli mesin otomatis dan memasarkan produk lewat media digital berhasil meningkatkan volume produksi dan penjualan sekaligus (Welly & Amir, 2025). Oleh karena itu, peningkatan laba bukan hanya hasil dari kerja keras semata, tetapi juga dari kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan strategi yang tepat.

Namun, di balik peluang tersebut, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh UMKM di Palembang. Keterbatasan kemampuan teknologi dan literasi digital menjadi kendala utama bagi sebagian pelaku usaha dalam memanfaatkan sepenuhnya teknologi ini. Selain itu, modal usaha yang terbatas dan sulitnya pengurusan perizinan usaha juga menjadi penghambat dalam mengoptimalkan potensi digitalisasi. Meskipun demikian, program-program pemerintah seperti Palembang Go-Digital berupaya mendorong percepatan adaptasi teknologi oleh UMKM agar mereka dapat bertahan dan berkembang di era digital. Dengan dukungan modal usaha yang memadai dan pemanfaatan teknologi

digital secara optimal, UMKM di Palembang berpotensi mengalami peningkatan laba yang signifikan, sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian kota secara keseluruhan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **”Pengaruh Teknologi Digitalisasi, Modal Usaha, Akses Pembiayaan Terhadap Peningkatan Laba UMKM Kota Palembang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini membahas tentang variable yang mempengaruhi kinerja UMKM Kota Palembang. Variabel ini yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh teknologi digitalisasi, modal usaha, akses pembiayaan terhadap peningkatan laba UMKM Kota Palembang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas terdapat masalah yang perlu diteliti dalam penelitian ini :

- 1) Bagaimana pengaruh teknologi digitalisasi terhadap peningkatan laba pada UMKM Kota Palembang?
- 2) Bagaimana pengaruh modal usaha terhadap peningkatan laba pada UMKM Kota Palembang?
- 3) Bagaimana pengaruh akses pembiayaan terhadap peningkatan laba UMKM Kota Palembang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diperoleh untuk menganalisis:

- 1) Pengaruh teknologi digitalisasi terhadap peningkatan laba pada UMKM
- 2) Pengaruh modal usaha terhadap peningkatan laba UMKM

### 3) Pengaruh akses pembiayaan terhadap peningkatan laba UMKM

#### 1.4 Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan yang terlalu meluas dalam penulisan laporan akhir maka penulis hanya membahas pada pengaruh teknologi digitalisasi, modal usaha dan akses pembiayaan terhadap peningkatan laba UMKM yang dikelola UMKM dikota Palembang.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

##### 1. Manfaaar teoritis

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai pengaruh teknologi digitalisasi, modal usaha, dan akses pembiayaan terhadap kinerja UMKM..

##### 2. Manfaat Praktis

###### 1. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Kota Palembang sebagai masukan dan salah satu informasi tentang bagaimana mempertahankan dan menjaga kewirausahaanya sehingga dapat menjadi lebih produktif dan dapat bertahan di era teknologi saat ini.

###### 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti yang diperoleh selama kuliah

khususnya mengenai pengaruh teknologi digitalisasi, modal usaha, dan akses pembiayaan terhadap peningkatan laba dikota Palembang dengan adanya perkembangan zaman.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penafsiran dan menggapai tujuan yang dihendak, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi atau hal-hal yang dibahas didalam tiap-tiap bab. Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II – TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Pada bab ini penulis menguraikan teori dan ide-ide dasar yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini, serta penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III – METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis membahas pendekatan yang dipilih untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, jenis penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, populasi, sampel,

metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk menguji hipotesis.

#### **BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan variabel-variabel yang memengaruhi teknologi digitalisasi, modal usaha, akses pembiayaan terhadap peningkatan laba berdasarkan uji hipotesis dan hasil dari sampel yang diteliti.

#### **BAB V – SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan terkait penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran terkait penelitian.